

Anggota DPR Minta Menhan Prabowo Jelaskan soal Denwalsus Kemenhan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI, Syaifulah Tamliha meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan soal rencana pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kemenhan. Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Denwalsus tersebut bertugas mengawal para tamu militer Kemenhan.

Tamliha mengatakan penjelasan perlu dilakukan setelah reses di DPR agar semua anggota Komisi I mendapatkan gambaran lengkap terkait Denwalsus Kemenhan tersebut.

"Agar kami bisa mendapatkan gambaran secara utuh dan komprehensif," kata Tamliha, Minggu (11/4).

Menurut Tamliha penjelasan harus meliputi dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) serta sumber anggaran dari Denwalsus Kemenhan. Ia mengatakan, dari penjelasan tersebut, jangan sampai ada tumpang tindih dalam detasemen yang sudah terbentuk di unit organisasi (UO) Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

"Menghindari tumpang tindih terhadap detasemen lain yang sudah terbentuk pada unit organisasi (UO)

Angkatan Darat, Laut dan Udara," ucapnya.

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kemenhan. Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Denwalsus tersebut bertugas mengawal para tamu militer Kemenhan.

"Sejak lama (Denwalsus) sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemenhan RI. Hanya saja, memang dilakukan penyesuaian personelnya," kata Dahnil, Sabtu (10/4).

Dahnil mengatakan, Prabowo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar menyediakan personel-personel yang secara fisik sempurna untuk Denwalsus karena akan menjadi tampilan depan dalam setiap upacara penyambutan tamu-tamu Kemenhan.

"Makanya Pak Menhan memberikan perhatian khusus terkait hal ini, karena menjadi salah satu simbol bangsa kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, Denwalsus ini berjumlah sekitar 100 orang lebih. "Ada sekitar 100 orang anggota," tutur Dahnil. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



MENSOS KUNJUNGI LOKASI DAMPAK GEMPA MALANG

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq (ketiga kanan) berbincang dengan warga terdampak gempa yang beristirahat di teras rumahnya di Desa Kali Uling, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (11/4). Dalam kunjungannya, Mensos Tri Rismaharini memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa dan meminta pemerintah setempat segera mencari lokasi yang aman untuk dibangun posko pengungsian.

Pemerintah akan Bangun 3 Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

JAKARTA (IM) - Pemerintah akan membangun tiga gedung lembaga pemasyarakatan (lapas) baru khusus narapidana teroris di Nusakambangan, Jawa Tengah. Rencana ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna mengatakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri telah memiliki rumah tahanan khusus teroris di Cikeas, Jawa Barat, pasca peristiwa di Mako Brimob. Namun dengan banyaknya tahanan Polri terkait terorisme saat ini, maka kapasitas lapas yang berlebih (over capacity) kembali terjadi.

"Kita dapat complain dari Polda, Kejaksaan

Tinggi, karena masih agak padat. Kalau khusus teroris, saya kira Polri masih punya tempat khusus untuk itu. Dan tahun ini kita bangun tiga lapas di Nusakambangan. Satu lapas maksimum security yang saya kira sudah cukup untuk itu," kata Yasonna saat ditemui di Jakarta, Sabtu (10/4).

Yasonna optimis Polri dapat menajalan tugasnya dengan baik dalam rangka menjaga keamanan masyarakat dan negara dari terorisme. Karena itu pemerintah mendukungnya dengan membangun fasilitas penunjang seperti lapas khusus teroris.

Ia mengatakan keberadaan lapas khusus terorisme sangat penting sebab narapidana teroris tak bisa dicampur dengan narapidana yang lain. ● han

KPK Tetap Berkomitmen Jalin Kerjasama dengan CPIB Singapura

KPK sangat berterima kasih atas jalinan kerja sama pemberantasan korupsi dengan CPIB Singapura.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berkomitmen menjalin kerjasama dengan Biro Penyelidikan Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura, dalam hal penanganan pemberantasan korupsi.

"Yang jelas sejauh ini Indonesia dan Singapura melalui KPK dan CPIB terus menjalin kerja sama, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, baik dalam hal pencegahan, pendidikan, maupun bidang penindakan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (11/4).

Ia mengatakan, bahwa CPIB sudah sering membantu lembaganya dalam sejumlah penanganan perkara tindak

pidana korupsi.

"Begitu juga dalam hal MLA (Mutual Legal Assistance) seperti penanganan perkara Innospec, Garuda (Indonesia), dan bahkan KTP elektronik," kata Nawawi.

KPK sangat berterima kasih atas jalinan kerja sama pemberantasan korupsi dengan CPIB selama ini.

"Tentu kami sangat berharap jalinan kerja sama ini terus berlanjut dan kian meningkat dan komitmen untuk terus saling membantu dalam penanganan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Ia juga meminta maaf jika ada pernyataan dari KPK yang menimbulkan ketidaknyamanan pemerintah Singapura. Hal tersebut merespons pernyataan dari Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto.

"Mohon maaf saya kebetulan tidak terlalu menyimak pernyataan yang disampaikan Deputy Penindakan yang telah memunculkan respons dari pemerintah Singapura. Namun, yang pasti kalau ada pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan lembaga yang telah menimbulkan ketidaknyamanan, tentu kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari pernyataan-pernyataan tersebut," kata Nawawi.

Saat konferensi pers "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2020", KPK telah bekerja sama dengan 10 nega-gak hukum di luar negeri sepanjang 2020 untuk menangkap kasus korupsi, termasuk dengan CPIB.

Bersama CPIB, KPK meminta bantuan pemanggilan saksi warga negara Singapura, meminta bantuan penelusuran dan pembekuan aset di Singapura, dan bantuan pencarian informasi dan data di Singapura untuk beberapa perkara yang sedang ditangani KPK.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Singapura melalui pernyataan resminya, Jumat (9/4) malam, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penegakan hukum sesuai dengan hukum dalam negeri dan kewajiban internasionalnya.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan untuk menanggapi pemberitaan media tentang

pernyataan Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di awal pekan ini mengenai kesulitan yang dihadapi pihak berwenang Indonesia menangkap buronan kasus korupsi, Singapura mengaku telah memberikan bantuan kepada pihak berwenang Indonesia dengan memberikan konfirmasi tentang keberadaan warga negara Indonesia tertentu yang sedang dalam penyelidikan. ● han

Yayasan Harapan Sebut Tak Pernah Miliki Niat Melakukan Swakelola TMII

JAKARTA (IM) - Yayasan Harapan Kita (YHK) sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), akhirnya memberikan penjelasan terkait diambilalihnya pengelolaan TMII oleh pemerintah.

Sekretaris YHK Tria Sangka Putra Ismail Saleh menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memiliki niat melakukan swakelola terhadap kawasan wisata sekaligus edukasi di Jakarta Timur itu.

"Kami tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola Taman Mini Indonesia Indah secara mandiri," kata Tria dikutip dari siaran pers, Minggu (11/4).

Tria mengatakan, dalam sejarah pendirian TMII pada rentang waktu 3 tahun sejak pembangunannya tahun 1972 sampai persmian tahun 1975, TMII langsung diserahkan kepada negara oleh YHK.

Ia menegaskan, penggagas TMII, yaitu mendiang Presiden Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri.

"Hal ini dapat dilihat bahwa pada rentang waktu selama 3 tahun sejak pembangunan di tahun 1972 sampai persmian tahun 1975, TMII langsung diserahkan dan diserahkan kepada negara," katanya.

Bahkan pada 2010, kata dia, Sekretariat Negara telah melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Pakai dari atas nama Yayasan Harapan Kita menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146.7704 hektare.

"Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selama ini, YHK telah membentuk Badan Pengelola dan Pengembangan TMII sebagai kontribusi kepada negara," katanya.

Bahkan YHK selaku penerima penugasan dari negara, kata dia, telah melakukan tugas mengelola hingga TMII memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan berbasis pada kompetensi manajerial dan teknis. Utamanya terhadap skill (keterampilan), personal's atribut (atribut perseorangan), knowledge (ilmu pengetahuan), dan job behaviour (perilaku kinerja) yang terukur dan dapat dievaluasi.

Dalam pengelolaan hingga rentang 2021, YHK memiliki total SDM sebanyak 700 orang. TMII juga telah membangun berbagai bangunan dan fasilitas yang terdiri dari 34 anjungan setiap provinsi di Indonesia, 16 museum, 7 tem-

pat peribadahan, 12 unit flora dan fauna, 9 wahana rekreasi, dan 17 fasilitas berupa hotel dan resto.

Kemudian art shop & gallery, lease of dan public transportation yang diperuntukan bagi wahana pelestarian budaya Indonesia.

"Seluruh fasilitas itu berada di bawah pengelolaan manajemen TMII," katanya.

Tria mengatakan, YHK juga telah melakukan tata kelola TMII dalam bidang manajemen dan bidang keuangan yang dilaksanakan dengan proses audit secara otonom. Antara lain membentuk unit atau organisasi pengelola, mengurus SDM, melaksanakan operasi manajemen, pemeliharaan, serta melanjutkan pembangunan dan dengan pendanaannya dibiayai langsung oleh YHK tanpa bantuan pemerintah.

"Selama ini, audit dalam bidang keuangan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan TMII," katanya.

Tria menambahkan, YHK pun mengukuhkan TMII ke dalam akta persembahkan nomor 47 pada 17 Juni 1987. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Menteri Sekretaris Negara Praktiko menyampaikan dalam konferensi pers, pemerintah mengambil alih kembali pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Menurutnya, dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 yang mengatur tentang pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (9/4) mengatakan, salah satu yang jadi pertimbangan pengambilalihan, yakni kerugian yang dialami pengelola TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar. ● han



IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Melalui sepucuk surat, EWra Setyowati tak lagi menjadikan Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya.

"Dengan ini menyatakan mencabut kuasa yang saya berikan kepada DR. H. Razman Arif Nasution, S.Ag, MH (Ph.D) dkk, sebagaimana ter-tuang dalam surat kuasa dari kantor hukum "RAN Law Firm" Nomor 59/RAN/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021," kata Era lewat surat tersebut, Minggu (11/4).

Alasan Era mencabut kuasanya lantaran Razman dinilainya tidak sejalan dengan kepentingan dirinya. Bahkan ia menganggap apa yang dilakukan Razman malah membuat semakin gaduh suasana.

"Adapun alasan pencabutan kuasa ini ialah karena saya menyadari bahwa upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum, dimaksud ternyata tidak sejalan dengan komitmen/ keinginan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik baik, namun justru Sdr.

acara tertentu, melainkan untuk kebutuhan sebagai saksi," ujarnya.

Kurnia menyebut, alasan ketiga terkait kasus korupsi benih bening lobster (BBL) dengan terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Saat itu, Kartoyo mengatakan tidak perlu memanggil dan mencari keterangan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar. Padahal, PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah menjelaskan bahwa ada perintah dari Edhy pada Antam terkait Bank Garansi.

"Keempat, dalam penanganan kasus korupsi bansos. Kedepastian Penindakan tidak segera memanggil Herman Herry terkait statusnya sebagai saksi, tindakan pengecekan KPK juga terkesan lambat," ungkap Kurnia.

Alasan kelima KPK memecat Karyoto menurut Kurnia adalah keterangan Kartoyo, terkait status perkara dugaan suap proyek penyediaan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agung Firman di loby gedung KPK, Jakarta pada Desember 2020.

"Padahal kedatangan dari Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu bukan dalam rangka menghadiri

Lewat Sepucuk Surat, Era Setyowati Batalkan Razman Jadi Pengacaranya

JAKARTA (IM) - Melalui sepucuk surat, EWra Setyowati tak lagi menjadikan Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya.

"Dengan ini menyatakan mencabut kuasa yang saya berikan kepada DR. H. Razman Arif Nasution, S.Ag, MH (Ph.D) dkk, sebagaimana ter-tuang dalam surat kuasa dari kantor hukum "RAN Law Firm" Nomor 59/RAN/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021," kata Era lewat surat tersebut, Minggu (11/4).

Alasan Era mencabut kuasanya lantaran Razman dinilainya tidak sejalan dengan kepentingan dirinya. Bahkan ia menganggap apa yang dilakukan Razman malah membuat semakin gaduh suasana.

"Adapun alasan pencabutan kuasa ini ialah karena saya menyadari bahwa upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum, dimaksud ternyata tidak sejalan dengan komitmen/ keinginan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara baik baik, namun justru Sdr.

Razman Arif Nasution, dkk, melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh suasana dan dapat merugikan kepentingan saya," tegasnya.

"Demikian surat pencabutan kuasa ini saya buat dalam keadaan sehat dan atas kesadaran sendiri, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun," kata Era.

Sekadar informasi, Era Setyowati alias Sierra menuntut pertanggungjawaban Profesor M terhadap sang anak. Miss Landscape Indonesia 2019 itu merasa buah hatinya telah ditelantarkan.

Namun kasus penelantaran anak yang menyeret Guru Besar UNPAD, Prof M, memasuki babak baru. Era Setyowati tiba-tiba mencabut gugatan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kabar ini berhembus setelah foto surat tanda terima pencabutan gugatan yang dilakukan Era Setyowati beredar di media sosial. Dalam surat itu, terlihat jelas bahwa Era Setyowati telah resmi men-



PELEBURAN KEMENRISTEK KE KEMENDIKBUD

Sejumlah pegawai memasuki Kantor Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) /Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Minggu (11/4). Presiden Joko Widodo mengusulkan melebur Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seiring dengan kebijakan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi lembaga otonom.

PENGUMUMAN
DAFTAR RENCANA PEMBAGIAN KEPADA KREDITOR
PT BERLAN ANGRAH ESTETIKA
(DALAM LIKUIDASI)
Sehubungan dengan rencana pembagian dalam likuidasi PT Berlan Anghrah Estetika (Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka penyelesaian likuidasi), dan dengan ini diberitahukan kepada Para Kreditor bahwa daftar rencana pembagian telah ditugaskan oleh Tim Likuidator pada 5 April 2021, dan dapat dilihat di Kantor Tim Likuidator PT Berlan Anghrah Estetika (Dalam Likuidasi) beralamat kantor di: Beba Agriarsyah Partnership, The H Tower, 12th Floor, Unit 12.05 HR, Raseana Sateo Kav. 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12560.
Apabila terdapat Kreditor yang keberatan terhadap daftar rencana pembagian PT Berlan Anghrah Estetika (Dalam Likuidasi) dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengumuman ini berlaku sebagai Pemberitahuan bagi Para Pemegang Saham, Para Kreditor dan Para Pihak yang Berperwakilan. Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 12 April 2021.
Tim Likuidator PT Berlan Anghrah Estetika (Dalam Likuidasi)